



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI RAHMANI
2. Jabatan : KETUA JURUSAN TARI
3. NHK : 429735

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	431.493.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m ² /216 m ² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 310.733.000		
2. Tanah Seluas 320 m ² di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 70.480.000		
3. Tanah Seluas 1350 m ² di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 50.280.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	83.500.000
1. MOBIL, DATSUN GO+ PANCA T 1.2 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, HONDA D1BO2N12L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOTOR, HONDA NF11B2D1 M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
5. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
6. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	272.709.734

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp.

789.702.734

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

789.702.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.